



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Juni 2016

Halaman: 27

Pemkot Tambah Enam RTH		
●YULIANINGSIH Warga diminta secara mandiri merawat ruang terbuka hijau. YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berencana menambah ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah kelurahan. Tahun ini dicanangkan penambahan enam RTH untuk meningkatkan ruang hijau perkotaan, sekaligus menambah area publik. "Enam RTH baru ini rata-rata luasnya seribu meter persegi dan harus selesai Desember tahun ini," ujar Kepala Seksi Taman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Rina Aryati di Yogyakarta, Selasa (21/6). Menurut Rina, tambahan RTH ini rencananya dibangun di wilayah Kelurahan Gunungketur, Prenggan, Kadipaten, Notoprajan, Sosromenduran, dan Kelurahan Keparakan. Ia mengatakan, tanah yang akan dibangun RTH itu merupakan milik Pemkot Yogyakarta hasil pembelian dari warga. Untuk pembangunannya disediakan anggaran total sebesar Rp 729 juta. Nantinya di ruang terbuka hijau itu akan dilengkapi beragam fasilitas, antara lain tempat duduk, tempat olahraga, permainan anak, hingga pangung untuk pertunjukan. Keberadaan RTH ini, kata dia, diharapkan ikut menguatkan kebersamaan warga di kelurahan. Sebenarnya, Rina mengatakan, luas lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan itu tidak layak dikategorikan sebagai RTH tingkat kelurahan. Sebab, untuk membuat RTH tingkat kelurahan dibutuhkan tanah di seluas 5.000 meter. Menurut dia, Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkot Yogyakarta memang kesulitan untuk mencari tanah dengan luas tersebut untuk dijadikan RTH. Terlebih, harga tanah per meter di wilayah Kota Yogyakarta disebut sudah melejit dan ada keterbatasan dana yang tersedia dalam APBD. "Kalau seribu meter itu baru tingkat RW," ujar dia. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan BLH Kota Yogyakarta Ika Kostika mengharapkan, setelah pembangunan RTH rampung, warga setempat dapat mengelolanya secara mandiri. BLH, kata dia, hanya berperan memfasilitasi pembangunan di awal. Untuk perawatan RTH, menurut dia, diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat dengan biaya mandiri. Pasalnya, menurut Ika, ada sejumlah RTH yang beralih fungsi lantaran tidak dirawat masyarakat setempat. Misalnya, RTH di bantaran Sungai Winongo yang berubah menjadi lokasi penambangan pasir, dan fasilitas taman bermainnya pun rusak. "Jadi, kami harapkan RTH yang sudah ada maupun yang akan dibangun harus dirawat secara mandiri," ujar dia. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) setempat mewacanakan pembangunan taman di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di wilayah Dusun Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Kepala Kapedal Gunungkidul Irawan Jatmiko mengatakan, pembangunan taman itu direncanakan pada 2017 berbarengan dengan penyelesaian program biogas yang sebelumnya sudah menasar 20 kepala keluarga penduduk Wukirsari. Irawan menyebut, nantinya taman TPAS Wukirsari bisa digunakan sebagai lokasi pembelajaran atau edukasi. Di samping itu, bisa juga jadi tujuan wisata dengan memanfaatkan hutan kota di sebelah barat TPAS. Dengan begitu, ia berharap, citra negatif TPAS selama ini bisa hilang dan ke depan dapat menjadi sarana belajar masyarakat tentang sampah dan bagaimana pengelolanya. "Nantinya pemkab akan menata lebih bersih dan tidak terlihat kumuh. Namun, kami ajukan anggaran terlebih dahulu," kata dia. ■ antara ed: Irfan fitrat		
Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. BLH	☐ Negatif	☐ Amat Seg
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☒ Netral	☒ Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005